**BAB II**

**KAJIAN PUSTAKA, KERANGKA PEMIKIRAN, DAN HIPOTESIS**

**2.1 Kajian Pustaka**

Dalam menganalisis pengaruh infrastruktur (jalan, listrik, air bersih) dan pengeluaran pembangunan terhadap pertumbuhan ekonomi kabupaten/kota di Jawa Barat, penelitian ini mendasarkan pada teori-teori yang relevan sehingga mendukung bagi tercapainya hasil penelitian yang ilmiah.

**2.1.1 Pertumbuhan Ekonomi**

**Prof. Simon Kuznets** mendefinisikan pertumbuhan ekonomi sebagai kenaikan jangka panjang dalam kemampuan suatu negara untuk menyediakan semakin banyak jenis barang-barang ekonomi kepada penduduknya, kemampuan ini tumbuh sesuai dengan kemajuan teknologinya dan penyesuaian kelembagaan dan ideologis negara yang bersangkutan **(M.L. Jhingan, 2012)**.

**Menurut Arsyad (1999**), pertumbuhan ekonomi diartikan sebagai kenaikan Produk Domestik Bruto atau Pendapatan Nasional Bruto tanpa memandang apakah kenaikan tersebut lebih besar atau lebih kecil dari tingkat pertumbuhan penduduk atau apakah perubahan struktur ekonomi terjadi atau tidak.

**Sadono Sukirno (2002)**, mengartikan pertumbuhan ekonomi sebagai perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi meningkat dalam kegiatan ekonomi masyarakat, pertumbuhan menyangkut perkembangan yang berdimensi tunggal dan diukur dengan meningkatnya hasil produksi dan pendapatan.

Menurut **Todaro dan Smith (2006)**, pertumbuhan ekonomi merupakan suatu proses peningkatan kapasitas produktif dalam suatu perekonomian secara terus-menerus atau berkesinambungan sepanjang waktu sehingga menghasilkan tingkat pendapatan dan output nasional yang semakin lama semakin besar.

**2.1.1.1 Konsep Pertumbuhan Ekonomi**

Secara ekonomi, ada beberapa cara untuk memperhitungkan pertumbuhan ekonomi, baik dilihat dari sisi permintaan maupun jika dilihat dari sisi penawaran. Apabila dari sisi permintaan (*demand*) yaitu dengan memperhitungkan komponen-komponen makro ekonomi berupa konsumsi, investasi, ekspor dan impor sedangkan dari sisi penawaran (*supply*) dengan memperhitungkan nilai tambah setiap sektor dalam produksi nasional. Perekonomian dibagi menjadi tiga sektor besar, yaitu primer, sekunder dan jasa-jasa (tersier). Laju pertumbuhan ekonomi akan diukur melalui indikator perkembangan PDB atau PNB dari tahun ke tahun. Adapun cara menghitung laju pertumbuhan dilakukan dengan tiga metode yaitu, cara tahunan, cara rata-rata setiap tahun, dan cara compounding factor.

Pengukuran pertumbuhan ekonomi secara konvensional biasanya dengan menghitung peningkatan presentase dari Produk Domestik Bruto (PDB). PDB mengukur pengeluaran total dari suatu perekonomian terhadap berbagai barang dan jasa yang baru diproduksi pada suatu saat atau tahun serta pendapatan total yang diterima dari adanya seluruh produksi barang dan jasa tersebut atau secara lebih rinci, PDB adalah nilai pasar dari semua barang dan jasa yang diproduksi di suatu negara dalam kurun waktu tertentu **(Mankiw, 2001:126)**. Pertumbuhan biasanya dihitung dalam nilai riil dengan tujuan untuk menghilangkan adanya inflasi dalam harga dan jasa yang diproduksi sehingga PDB riil mencerminkan perubahan kuantitas produksi.

Untuk mengetahui pertumbuhan ekonomi, digunakanlah data laju pertumbuhan ekonomi yang merupakan suatu ukuran untuk melihat aktivitas perekonomian suatu daerah. Secara teori, laju pertumbuhan ekonomi tidak dapat dipisahkan dari Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) baik dari konsep, definisi, metodologi, cakupan dan sumber datanya. Hal ini dilakukan untuk menjaga keseragaman konsep, definisi dan metoda yang dipakai di seluruh Indonesia.

**2.1.1.2 Teori Pertumbuhan Ekonomi Klasik**

Teori pertumbuhan klasik pertama kali dikemukakan oleh **Adam smith**. Menurut **Adam Smith**, ada dua hal yang menyebabkan terjadinya pertumbuhan ekonomi, yaitu pertumbuhan penduduk dan pembagian tugas para pekerja. Faktor yang terpenting adalah faktor perumbuhan penduduk, karena dengan pertumbuhan penduduk cenderung akan meningkatkan produksi yang pada akhirnya akan mendorong adanya spesialisasi dan pembagian kerja pada tenaga kerja. Kedua hal ini lah yang akan menyebabkan kegiatan ekonomi semakin meningkat dan mempercepat pertumbuhan ekonomi serta mendorong terjadinya perkembangan teknologi. **Adam Smith** sangat yakin bahwa proses ini akan berkelanjutan sehingga berdampak pada peningkatan pertumbuhan ekonomi dan pendapatan perkapita masyarakat.

Para ekonom aliran klasik yang telah mempelajari gejala pertumbuhan ekonomi, melihat bahwa terdapat faktor-faktor yang dapat mempengaruhi pertumbuhan ekonomi. Dalam pembahasan teori produksi (Teori Ekonomi Mikro), telah diperkenalkan dengan fungsi produksi klasik sederhana **(Pratama dan Manurung, 2008: 136)**:

Q = f (K,L)..........................................................................................(2.1)

dimana:

Q = output

K = barang modal

L = tenaga kerja

Untuk analisis pertumbuhan ekonomi (analisis makro), model klasik tersebut dapat dikembangkan lebih lanjut, sehingga dapat ditulis persamaan:

Q = f (K,L,T)......................................................................................(2.2)

dimana:

Q = output atau PDB

K = barang modal

L = tenaga kerja

T = teknologi

Persamaan diatas secara sederhana menunjukkan faktor-faktor yang menentukan pertumbuhan ekonomi. Berikut ini akan dijelaskan faktor-faktor penentu pertumbuhan ekonomi tersebut **(Pratama dan Manurung, 2008: 136-137)**

**2.1.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi Harrod-Domar**

Teori pertumbuhan **Harrod-Domar** ini dikembangkan oleh dua ekonom sesudah **Keynes** yaitu **Evsey Domar** dan **Sir Roy F. Harrod**. Teori **Harrod-Domar** ini mempunyai asumsi yaitu:

1. Perekonomian dalam keadaan pengerjaan penuh (*full employment*) dan barang-barang modal yang terdiri dalam masyarakat digunakan secara penuh.
2. Perekonomian terdiri dari dua sektor yaitu sektor rumah tangga dan sektor perusahaan.
3. Besarnya tabungan proporsional dengan besarnya pendapatan nasional.
4. Kecenderungan untuk menabung (*Marginal Propensity to Save* = MPS) besarnya tetap, demikian juga rasio antara modal-output (*Capital-Output Ratio* atau COR) dan rasio pertambahan modal-output (*Incremental Capital-Output Ratio* atau ICOR).

Menurut **Harrod-Domar**, setiap perekonomian dapat menyisihkan suatu proporsi tertentu dari pendapatan nasionalnya jika hanya untuk mengganti barang-barang modal yang rusak. Namun demikian untuk menumbuhkan perekonomian tersebut, diperlukan investasi-investasi baru sebagai tambahan stok modal. Hubungan tersebut telah kita kenal dengan istilah rasio modal-output (*Capital-Output Ratio* atau COR). Dalam teori ini disebutkan bahwa, jika ingin tumbuh, perekonomian harus menabung dan menginvestasikan suatu proporsi tertentu dari output totalnya. Semakin banyak tabungan dan kemudian di investasikan, maka semakin cepat perekonomian itu akan tumbuh **(Lincolyn, 2004:64-67)**.

**2.1.1.4 Teori Pertumbuhan Ekonomi Solow**

Teori ini dikembangkan oleh **Solow (dikutip oleh Kuncoro, 2010)**. Menurut Teori pertumbuhan Neo-Klasik, pertumbuhan ekonomi tergantung pada penambahan persediaan faktor-faktor produksi dan tingkat kemajuan teknologi. Pandangan ini didasarkan pada anggapan yang di peroleh dari Mazhab Klasik yang menyatakan bahwa perekonomian berada pada kondisi *full employment* sehingga faktor-faktor produksi sudah digunakan secara penuh. Penambahan output menurut Kaum Klasik hanya akan terjadi apabila ada penambahan dari faktor-faktor produksi tersebut **(Sukirno, 2004)**. Asumsi yang digunakan dalam teori **Solow-Swan** adalah sebagai berikut **(Situmorang, 2011)** :

1. *Full employment*, karena bekerjanya mekanisme pasar.

Dalam teori yang dikembangkan **Solow-Swan**, diasumsikan bahwa perekonomian adalah tertutup. Dalam perekonomian, perusahaan memproduksi barang dengan kombinasi tenaga kerja dan modal. Dalam perekonomian juga tidak ada intervensi pemerintah, sehingga perhitungan pendapatan nasional berdasarkan pengeluaran agregat.

Y = C+I ..............................................................................................(2.3)

S = I ...................................................................................................(2.4)

Dalam persamaan (2.4), pengumpulan *saving* tersebut seluruhnya digunakan untuk investasi yang nantinya akan menyebabkan peningkatan pendapatan nasional.

1. Teknologi dan populasi merupakan faktor eksogen.

Dalam teori **Solow-Swan**, *capital-output ratio* (COR) memiliki sifat yang dinamis, artinya dalam menghasilkan tingkat output tertentu dibutuhkan kombinasi yang seimbang antara kapital dan tenaga kerja. Jika penggunaan kapital tinggi maka penggunaan tenaga kerja akan rendah, sebaliknya jika penggunaan kapital rendah maka penggunaan tenaga kerja akan tinggi. Pokok pemikiran lainya adalah dalam fungsi produksinya adanya peningkatan teknologi (*augmenting*) pada faktor-faktor produksi seperti c*apital* dan *labor*, sebagaimana terlihat pada model di bawah:

Y = F(K, AL)......................................................................................(2.5)

Y = F(AK, L)......................................................................................(2.6)

Pada persamaan (2.5) terlihat bahwa teknologi melekat pada variabel *labor*, yang nantinya akan berdampak pada penerapan pola produksi yang di suatu negara yang lebih *labor intensive*. Persamaan (2.5) ini di sebut sebagai *purely labor augmenting*, sedangkan pada persamaan (2.6) terlihat bahwa teknologi melekat pada c*apital*, yang nantinya berdampak pada pola produksi yang cenderung lebih *capital intensive*. Persamaaan (2.6) ini disebut sebagai *purely capital augmenting*.

**2.1.2 Infrastruktur**

Pembangunan menurut **Todaro dan Smith (2006:22)** harus dipandang sebagai suatu proses multidimensional yang mencakup berbagai perubahan mendasar atas struktur sosial, sikap-sikap masyarakat, dan institusi-institusi nasional, di samping tetap mengejar pertumbuhan ekonomi dan penanganan ketimpangan pendapatan. Secara garis besar, pembangunan ekonomi dapat diartikan sebagai serangkaian usaha dalam perekonomian untuk mengembangkan kegiatan ekonominya sehingga pembangunan infrastruktur akan semakin berkembang, taraf pendidikan semakin tinggi, dan teknologi semakin meningkat. Implikasi dari perkembangan kegiatan ekonomi ini diharapkan dapat memperluas kesempatan kerja yang akan mengurangi angka pengangguran. Selain itu kemakmuran masyarakat menjadi semakin tinggi akibat peningkatan pendapatan masyarakat.

Pengadaan infrastruktur ini meliputi pembangunan jalan, penyediaan energi listrik, penyediaan sarana air bersih, dan sebagainya. Keseluruhan dari adanya penyediaan infrastruktur ini sangat dibutuhkan dalam menunjang dan mengintegrasikan aktivitas-aktivitas ekonomi dalam suatu negara.

Infrastruktur merupakan aspek penting dalam mempercepat proses pembangunan nasional sehingga dapat dikatakan sebagai roda penggerak pertumbuhan ekonomi suatu bangsa. Gerak laju dan pertumbuhan ekonomi suatu bangsa tidak bisa terlepas dari ketersediaan infrastruktur seperti jalan, listrik dan air. Adanya jalan yang memadai akan mempermudah proses pendistribusian barang dan jasa dari suatu tempat ke tempat lain. Listrik, dan air bersih merupakan elemen yang sangat penting dalam proses produksi dari sektor-sektor ekonomi seperti rumah tangga, industri, dan pertanian. Hal ini tentu saja akan meningkatkan efisiensi dalam proses produksi maupun dalam menunjang proses pendistribusian.

Keberadaan infrastruktur yang memadai akan mendorong terjadinya peningkatan produktivitas bagi faktor-faktor produksi sehingga output yang dihasilkan dapat meningkat. Sebaliknya apabila infrastruktur itu diabaikan maka akan menurunkan produktivitasnya yang berimplikasi pada penurunan pertumbuhan nasional karena output yang dihasilkan menurun.

**World Bank (1994)** membagi infrastruktur menjadi beberapa komponen yaitu:

1. Infrastruktur ekonomi, merupakan infrastruktur fisik yang diperlukan untuk menunjang aktivitas ekonomi yang meliputi *public utilities* (tenaga listrik, telekomunikasi, air, sanitasi, gas), pekerjaan umum (jalan, bendungan, kanal, irigasi, drainase) dan sektor transportasi (jalan, rel, pelabuhan, bandara, dan sebagainya).
2. Infrastruktur sosial, meliputi pendidikan, kesehatan, perumahan dan rekreasi.
3. Infrastruktur administrasi/instansi, meliputi penegak hukum, kontrol administrasi dan koordinasi serta kebudayaan.

Selain itu ada yang membagi infrastruktur menjadi infrastruktur keras fisik, keras nonfisik, dan lunak **(Faishal Basri, 2009)** :

1. Infrastruktur keras fisik meliputi jalan raya, rel kereta api, bandara, pelabuhan, bendungan, dan saluran irigasi.
2. Infrastruktur keras nonfisik meliputi air bersih, listrik, telekomunikasi, dan energi.
3. Infrastruktur lunak meliputi nilai, norma dan hukum.

Keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan output. Kurangnya ketersediaan infrastruktur di suatu daerah menyebabkan potensi sumberdaya yang ada di daerah tersebut sulit untuk berkembang. Jika infrastruktur daerah dapat berkembang dengan baik maka akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang ada di daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini diakibatkan karena mudahnya mobilitas faktor produksi yang terjadi antar daerah.

Berawal dari fungsi produksi **Cobb-Douglas**yang menyatakan bahwa produktivitas output terdiri dari tenaga kerja, modal dan teknologi. Setiap peningkatan pada jumlah tenaga kerja, modal dan teknologi akan memengaruhi perubahan pada tingkat output yang dihasilkan. Dalam penelitian ini modal yang digunakan yaitu dari sektor infrastruktur yang difokuskan pada infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. Kemudian peningkatan infrastruktur ini akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi.

**2.1.2.1 Infrastruktur Jalan**

Infrastruktur adalah suatu prasarana trasnportasi darat yang meliputi segala bagian jalan, termaksud bangunan pelengkap dan perlengkapannya yang diperuntukkan bagi lalu lintas yang berada pada permukaan tanah, dibawah permukaan tanah dan/atau air, serta diatas permukaan air, kecuali jalan kereta api, jalan lori, dan jalan kabel. Adanya jalan yang baik merupakan persyaratan dasar yang harus dipenuhi untuk mendukung pertumbuhan suatu daerah perkotaan. Selain itu, jalan bertujuan untuk mendukung mobilitas barang dan penumpang antar pusat kota dengan kawasan industri dan jasa, perkantoran, dan kawasan perumahan dan pemukiman serta daerah pinggiran (*hinterland*). Jalan juga bertujuan untuk menunjang fungsi kota sebagai pusat pertumbuhan dan mendorong pemerataan pembangunan di dalam kota serta kaitan dengan daerah belakangnya (*hinterland*) **(Sjafrizal, 2012)**.

Pada kaitannya dengan pembangunan daerah dan perkotaan, jalan memiliki fungsi ganda. Di satu sisi, jalan memiliki fungsi sebagai pendorong pertumbuhan ekonomi dengan memperlancar arus barang dan jasa antara pusat-pusat produksi dan daerah pemasaran atau sebaliknya. Sedangkan di sisi lain, jalan berfungsi untuk mengurangi ketimpangan pembangunan antar wilayah karena jalan dapat mengurangi isolasi kegiatan sosial ekonomi pada daerah-daerah yang kurang berkembang. Oleh sebab itu, pembangunan jalan merupakan landasan pokok pembangunan suatu daerah perkotaan **(Sjafrizal, 2012)**.

Jalan memiliki tujuan dan fungsi bagi perekonomian suatu wilayah. Tujuan dan fungsi tersebut, antara lain :

1. Dapat membuka akses atau jalan masuk dari suatu wilayah ke wilayah lain, yang disebut sebagai fungsi land acces. Fungsi ini sangat penting untuk meningkatkan PDRB dan mengurangi daerah yang tertinggal.
2. Jalan berfungsi untuk pelayanan masyarakat setempat (*community service function*). Pada fungsi ini jalan dapat memberikan jasa – jasanya dalam proses pendistribusian produk, pemasaran ataupun kegiatan-kegiatan masyarakat dan ekonomi lainnya.
3. Jalan dapat memberikan pelayanan bagi angkutan masyarakat jarak jauh dan antar kota atau wilayah, yang berfungsi sebagai *interchange community and long distance transportation*. Fungsi jalan ini penting bagi wilayah negara yang luas karena semakin berkembangnya teknologi kendaraan bermotor khususnya angkutan jalan jauh.

**2.1.2.2 Infrastruktur Listrik**

Infrastruktur lain yang juga sangat penting bagi perekonomian wilayah adalah Kelistrikan. Energi listrik merupaan salah satu energi yang sangat diperlukan sebagai salah satu pendukung produksi dan kehidupan sehari-hari. Semakin majunya suatu wilayah, kebutuhan akan listrik menjadi tuntunan primer yang harus dipenuhi, tidak hanya untuk rumah tangga namun juga untuk kegiatan ekonomi terutama industri. Pada kehidupan masyarakat yang semakin modern, maka semakin banyak rumah tangga, industri, serta aktivitas-aktivitas masyarakat yang mengandalkan sumber energi dari listrik.

Infrastruktur energi listrik yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan seberapa besar penggunaan energi listrik yang dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Penggunaan listrik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peningkatan Produk Domestik Regional Bruto yang juga akan berdampak pada pertumbuhan ekonomi, karena listrik sangat dibutuhkan sebagai faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi di sektor manufaktur **(Amalia, 2007)**. Tanpa adanya listrik kegiatan proses produksi dapat terhambat sehingga pada akhirnya jumlah produksi akan berkurang dan mengakibatkan menurunnya pendapatan.

**2.1.2.3 Infrastruktur Air Bersih**

Air bersih merupakan kebutuhan vital yang mutlak diperlukan dalam kehidupan manusia sehingga pengadaan sumber daya ini termaksud dalam prioritas pembangunan. Pengalokasian air bersih yang efisien harus didasarkan pada sifat zat cair yang mudah mengalir, menguap, meresap, dan keluar melalui suatu media tertentu **(Tri Wahyuni, 2009)**. Penggunaan air terbesar berdasarkan sektor kegiatan dapat dibagi ke dalam tiga kelompok besar yaitu kebutuhan domestik, irigasi pertanian dan industri. Kebutuhan domestik untuk masyarakat akan meningkat sejalan dengan pertambahan penduduk baik di perkotaan maupun pedesaan. Air untuk keperluan irigasi pertanian juga terus meningkat dalam rangka memenuhi kebutuhan pangan penduduk yang terus bertambah. Demikian juga dalam bidang industri, yang kian mengalami peningkatan karena struktur perekonomian yang mengarah pada industrialisasi.

Industrialisasi yang meluas membutuhkan investasi yang besar untuk menjaga tingkat penyediaan air dan mendukung pertumbuhan ekonomi. Di Indonesia, tingkat kebutuhan masyarakat terhadap keberadaan air bersih secara kontinyu terus meningkat dari tahun ke tahun. Infrastruktur air bersih merupakan salah satu bagian penting dalam infrastruktur dasar yang dapat memberi pengaruh bagi pertumbuhan output **(Bulohlabna, 2008)**.

**2.1.3 Teori Barang Publik**

Infrastruktur lebih mengarah kepada sifat barang publik. Jenis barang yang dibutuhkan oleh masyarakat, akan tetapi tidak seorang pun yang bersedia menghasilkannya atau mungkin dihasilkan oleh pihak swasta akan tetapi dalam jumlah yang terbatas, jenis barang tersebut dinamakan barang publik **(Mangkoesoebroto, 1993)**. Barang publik mempunyai dua ciri utama dari sisi penggunaanya yaitu *non-rivalry* dan *non-excludable*. *Non-rivalry* mengacu pada ide bahwa ada beberapa barang yang manfaatnya dapat dinikmati oleh lebih dari satu orang pada waktu yang sama. *Non-excludable* artinya ketika seseorang dapat menikmati manfaat suatu barang disaat orang tersebut membayar maupun tidak.

Teori barang publik dapat dijelaskan berdasarkan pandangan dari teori pigou dan teori anggaran sebagai berikut :

**2.1.3.1 Teori Pigou**

Teori Pigou **(dikutip oleh Mangkoesoebroto, 1993)** menjelaskan mengenai penyediaan barang publik yang dibiayai dari pajak yang dipungut dari masyarakat. Pigou berpendapat bahwa barang publik harus disediakan sampai suatu tingkat dimana kepuasan marginal akan barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal akan pajak yang dipungut untuk membiayai program-program pemerintah atau untuk menyediakan barang publik.

**Gambar 2.1 Penyediaan dan Pembiayaan Barang Publik yang Optimal**

**(Pigou)**



Sumber : Mangkoesoebroto 1993

Kurva ini menjelaskan perbandingan kepuasan batas akan barang pemerintah dengan budget pemerintah. U adalah kepuasan marginal atas barang publik, P adalah pajak. AD yang lebih besar dari DG artinya masyarakat mempunyai kepuasan marginal terhadap barang publik lebih besar daripada ketidakpuasan marginal membayar pajak. Kepuasan marginal akan barang publik yang mempunyai bentuk menurun, mengartikan bahwa semakin banyak barang publik yang dihasilkan maka akan semakin rendah kepuasan marginal yang dirasakan oleh masyarakat. Hal ini disebabkan karena adanya pungutan pajak. Semakin banyak pajak yang di pungut, semakin besar rasa ketidakpuasan marginal masyarakat. Titik E adalah keadaan optimum di mana bagi masyarakat kepuasan marginal untuk barang publik sama dengan ketidakpuasan marginal dalam hal pembayaran pajak. Titik CF lebih besar dari FI menunjukkan kepuasan membayar pajak lebih besar, untuk itu pemerintah diharapkan memperkecil anggaran untuk menghasilkan barang publik yang lebih sedikit.

Kelemahan teori ini karena didasarkan pada rasa ketidakpuasan marginal masyarakat dalam membayar pajak dan kepuasan marginal akan barang publik. Padahal kepuasan dan ketidakpuasan adalah sesuatu yang tidak dapat diukur secara kuantitatif karena sifatnya ordinal.

**2.1.3.2 Teori Anggaran**

Teori alokasi barang-barang melalui anggaran. Teori ini didasarkan pada suatu analisa dimana setiap orang membayar atas penggunaan barang publik dengan jumlah yang sama, sistem yang sama dengan barang swasta. Kelemahan teori ini karena menggunakan kurva indiferens sebagai alat analisis.

Teori anggaran mempunyai solusi, yaitu :

1. Selaras dengan distribusi pendapatan.
2. Individu membayar harga yang sama antara barang publik dan barang swasta, sehingga konsumen berada pada titik keseimbangan.
3. Pembayaran pajak untuk membiayai penyediaan barang publik sama besarnya dengan biaya total.

**Gambar 2.2 Teori Alokasi Barang Publik Melalui Anggaran**



Sumber : Mangkoesoebroto 1993

CG adalah kurva kemungkinan produksi. MA merupakan garis anggaran A. NB adalah garis anggaran B. Persinggungan anggaran A dengan kurva indiferens berada di titik F, sehingga A akan mengkonsumsi barang publik sebesar G0 dengan penghasilan OM0 dan barang swasta sebesar MM0. B akan mengkonsumsi barang swasta sebesar CC0 – MM0 = NN0. Apabila A merubah garis anggaran, maka A mengkonsumsi barang publik sebesar G1, sehingga A akan mengkonsumsi barang swasta sebesar MM1 dan B akan mengkonsumsi barang swasta sebesar CC1 – MM1 = NN1. NJ adalah barang swasta yang tersedia untuk individu B dan akan mencapai nilai optimum mengkonsumsi barang publik dan swasta di titik Q. MV adalah barang swasta yang tersedia untuk A, sehingga A berada pada tingkat keseimbangan konsumen di titik F dan total produksi berada di titik E.

**2.1.4 Pengeluaran Pembangunan**

Pengeluaran pembangunan yaitu pengeluaran yang digunakan untuk membiayai pembangunan di bidang ekonomi, sosial dan umum dan yang bersifat menambah modal masyarakat dalam bentuk pembangunan baik prasarana fisik maupun non fisik yang dilaksanakan dalam periode tertentu. Anggaran pembangunan secara fisik maupun nonfisik selalu disesuaikan dengan dana yang dimobilisasi. Dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas yang telah direncanakan. Peranan anggaran pembangunan lebih ditekankan pada upaya penciptaan kondisi yang stabil dan kondusif bagi berlangsungnya proses pemulihan ekonomi dengan tetap memberikan stimulus bagi pertumbuhan ekonomi nasional.

Pengeluaran pembangunan juga disebut sebagai pengeluaran yang ditujukan untuk membiayai program-program pembangunan, baik fisik, seperti jalan, jembatan, gedung-gedung, dan pembelian kendaraan, maupun pembangunan nonfisik spiritual seperti misalnya penataran, training dan sebagainya, sehingga anggarannya selalu disesuaikan dengan dana yang berhasil dimobilisasi, dana ini kemudian dialokasikan pada berbagai bidang sesuai dengan prioritas.

Pengeluaran pembangunan dibedakan atas pengeluaran pembangunan yang dibiayai dengan dana rupiah dan bantuan proyek. Pembiayaan pembangunan rupiah dibiayai dari sumber pembiayaan dalam negeri dan luar negeri dalam bentuk pinjaman program. Pengelolaan dana tersebut akan dialokasikan kepada departemen dan dan lembaga pemerintah non departemen di tingkat pusat termasuk departemen Hankam dan pemerintah daerah yang diklasifikasikan ke dalam dana pembangunan yang dikelola instansi pusat dan dana pembangunan yang dikelola daerah. **(Basri, 2005)**.

Dalam rangka menutupi kesenjangan antara kebutuhan pembangunan dengan kemampuan dana dalam negeri maka pembiayaan proyek masih tetap dibutuhkan. Pembiayaan proyek bersumber dari luar negeri dalam bentuk pinjaman proyek dan dimanfaatkan untuk pembangunan sumber daya manusia di bidang pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan sosial dalam rangka mendukung program jaringan pengaman sosial, penyediaan sarana dan prasarana transportasi, pembangunan dibidang pertanian, tenaga listrik dan pengairan. Di samping itu juga dilakukan pengadaan prasarana pendukung Hankam, telekomunikasi dan pembangunan prasarana perkotaan. **(Basri, 2005)**.

**2.1.4.1 Teori Pengeluaran Pemerintah**

**2.1..4.1.1 Pengeluaran Pemerintah Secara Mikro**

Pengeluaran pemerintah secara mikro dimaksudkan untuk menyediakan barang publik yang tidak dapat disediakan pihak swasta dan sebagai akibat adanya kegagalan pasar **(Walter Nicholson,2002)**. Menurut **Guritno (1997)** secara mikroekonomi teori perkembangan pemerintah bertujuan untuk menganalisis faktor- faktor mengenai barang publik. Faktor-faktor permintaan akan barang publik dan faktor-faktor persediaan barang publik akan berinteraksi dengan penawaran untuk barang publik menentukan jumlah barang publik yang akan disediakan melalui anggaran belanja. Pengeluaran pemerintah untuk barang publik akan menstimulasi pengeluaran untuk barang lain. Perkembangan pengeluaran pemerintah dipengaruhi faktor-faktor di bawah ini:

1. Perubahan permintaan akan barang publik.
2. Perubahan dari aktifitas pemerintah dalam menghasilkan barang publik, dan juga perubahan dari kombinasi faktor produksi yang digunakan dalam proses produksi.
3. Perubahan kualitas barang publik.
4. Perubahan harga faktor - faktor produksi.

**2.1.4.1.2** **Pengeluaran Pemerintah Secara Makro**

Teori makro mengenai perkembangan pemerintah dikemukakan oleh para ahli ekonomi yaitu **Wagner** dan pasangan ahli ekonomi **Peacock dan Wiseman**. Menurut sisi makroekonomi yang dikemukakan **Musgrave (1989)** adalah untuk menganalisis ukuran pemerintahan sehingga dapat terlihat transaksi anggaran, perusahaan publik dan kebijakan publik. Pengeluaran pemerintah untuk sektor publik bersifat elastis terhadap pertumbuhan ekonomi. Semakin banyak pengeluaran pemerintah untuk sektor publik semakin banyak barang publik yang tersedia untuk masyarakat.

Sejalan seperti yang dikatakan **Musgrave**, menurut **Wagner (Guritno M, 1997)** jika pendapatan perkapita meningkat maka secara relatif pengeluaran pemerintah akan meningkat. Pengeluaran pemerintah yang semakin meningkat akan memacu adanya kegagalan pasar dan eksternalitas. Kelemahan hukum **Wagner** adalah karena hukum tersebut tidak didasarkan pada suatu teori mengenai pemilihan barang-barang publik. **Wagner** mendasarkan pandangannya dengan suatu teori yang disebut organis mengenai pemerintah (*organic theory of the state*) yang menganggap pemerintah sebagai individu yang bebas bertindak, terlepas dari anggota masyarakat lainnya. Hukum **Wagner** dapat diformulasikan sebagai berikut:



Keterangan:

GpC : Pengeluaran pemerintah perkapita

YpC : Produk atau pendapatan nasional per kapita

t : Indeks waktu

Hukum **Wagner** dalam Gambar 2.3 dimana kenaikan pengeluaran pemerintah mempunyai bentuk eksponensial ditunjukkan oleh kurva 1.

**Gambar 2.3 Pertumbuhan Pengeluaran Pemerintah menurut Wagner**

 

Sumber: Mangkoesoebroto, 1994

**Peacock dan Wiseman (1961) dalam Guritno Mangkoesoebroto (1999)** mengemukakan pendapat lain dalam menerangkan perilaku perkembangan pengeluaran pemerintah. Pemerintah lebih cenderung menaikkan pajak untuk membiayai anggarannya. Di sisi lain masyarakat memiliki keengganan untuk membayar pajak, terlebih lagi jika pajak terus dinaikkan. Mempertimbangkan teori pemungutan suara dimana masyarakat memiliki batas toleransi pembayaran pajak.

Perkembangan ekonomi menyebabkan pemungutan pajak yang semakin meningkat. Oleh karena itu, dalam keadaan normal meningkatnya GNP akan menyebabkan penerimaan pemerintah yang semakin besar, begitu juga dengan pengeluaran pemerintah menjadi semakin besar. Akibat adanya keadaan tertentu yang mengharuskan pemerintah untuk memperbesar pengeluarannya, maka pemerintah memanfaatkan pajak sebagai alternatif untuk peningkatan penerimaan negara. Jika tarif pajak dinaikkan maka pengeluaran investasi dan konsumsi masyarakat menjadi berkurang. Keadaan ini disebut efek pengalihan (*displacement effect*) yaitu adanya suatu gangguan sosial menyebabkan aktivitas swasta dialihkan pada aktivitas pemerintah.

**Gambar 2.4 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah**

 

 Sumber: Guritno Mangkoesoebroto, 1999

**2.1.5 Infrastruktur dan Pertumbuhan Ekonomi**

Pertumbuhan ekonomi dapat diartikan sebagai peingkatan pendapatan **(Sullivan.2006)** pertumbuhan ekonomi biasaya diukur dengan *Gross Domestic Product* (GDP) atau keseluruhan *values added* yang diciptakan di suatu negara.

Di balik itu ada beberapa hal yang menjadi sumber terjadinya pertumbuhan ekonomi. Sumber pertumbuhan ekonomi yan paling utama yaitu tersedianya faktor Kapital dan tenaga kerja. Peningkatan Kapital dan tenaga kerja akan meningkatan output secara agregat di dalam perekonomian. Kapital meliputi investasi sektor public dan privat di dalam perekonomian. Misalnya saja, sektor privat melakukan pembangunan pabrik, pembelian mesin-mesin produksi, dsb. Sedangkan sektor public dengan membangun infrastruktur seperti jalan, jembatan, jaringan telekomunikasi dan jaringan listrik yang disebut juga sebagai *public capital* **(Mankiw, 2003:18)**. **O’Sullivian (2006:27)** menjelaskan bahwa sumber pertumbuhan ekonomi lainnya di dapat dari proses *capital developing*, *human capital*, dan kemajuan teknologi.

*Capital deepening* merupakan peningkatan jumlah kapital untuk setiap pekerja artinya pekerja lebih bayak mendapatkan kesempatan untuk meningkatkan produktivitasnya dikarenakan banyaknya akses untuk memanfaatkan kapital yang ada.

*Human capital* berkenaan dengan tingkat pengeluaran atau pendidikan seseorang yag memberikan kontribusi terhadap tingkat produktivitas dan pendapatannya.. peningkatan pendidikan dan skill para pekerja juga memugkinkan terjadinya efek limpahan kepada pekerja yang lain yaitu dengan berbagai pengalaman, pengetahuan dan keterampilan. secara teori, pekerja yang lebih pandai akan lebih produktif dan akan lebih tinggi tingkat pendapatannya dengan memanfaatkan efek kelimpahan tersebut. Secara agregat dapat terjadi peningkatan tingkat produktivitas dan pendapatan pada pekerja lain. **O’Sullivan(2006)** menjelaskan bahwa peningkatan *human capital* akan meningkatkan produktivitas kerja dan pendapata sehingga akan terjadi pertumbuhan ekonomi.

Sumber yang terakhir adalah kemajuan teknologi, sumber pertumbuhan ini memberikan efek tidak langsung terhadap pertumbuhan ekonomi. Kemajuan teknologi mempengaruhi para pekerja. Kemajuan teknologi memberikan kemudahan dalam proses produksi, suatu masyarakat dengan tingkat pengetahuan yang sama akn lebih produktif ketika masyarakat tersebut mempunyai akses untuk memanfaatkan kemajuan teknologi dalam proses produksi. Peningkatan produktivitas akan meningkatkan tingkat pendapatan pekerja yang akan mendorong perekonomian.

Beberapa literatur pertumbuhan ekonomi baru (*new growth theory*) mencoba menjelaskan pentingnya infrastruktur dalam mendorong perekonomian. Teori ini memasukkan infastruktur sebagai input dalam mempengaruhi output agregat dan juga merupakan sumber yang mungkin dalam meningkatkan batas-batas kemajuan teknologi yang dapat memunculkan ekternalitas pada pembangunan infrastruktur. **(Hultren dan Schawb, 1991:9)** infrastuktur mempunyai efek eksternalitas yang nampak pada kegiatan produksi. Eksternalitas ini memberikan akses kemudahan dan kemungkinan kegiatan produksi menjadi lebih produktif. Eskternalitas ini disebut eksternalitas positif.

Secara nyata, sektor publik dapat dimasukkan ke dalam fungsi produksi sebab adanya peran penting dari sektor publik sebagai salah satu input dalam produksi. Peran sektor publik yang produktif tersebut akan menciptakan potensi keterkaitan positif antara pemerintah dan pertumbuhan ekonomi **(Barro, 1990)**.

**2.1.6 Pengeluaran Pembangunan dan Pertumbuhan Ekonomi**

Peranan pengeluaran pemerintah baik yang dibiayai melalui APBN maupun APBD khususnya pengeluaran untuk *human capital* dan infrastruktur fisik, dapat mempercepat pertumbuhan, tetapi pada sisi lain pembiayaan dari pengeluaran pemerintah tersebut dapat memperlambat pertumbuhan. Hal ini sangat tergantung pada sejauh mana produktifitas pengeluaran pemertintah tersebut dan distorsi pajak yang ditimbulkannya, yang mana dalam konteks ini pemerintah baik secara langsung maupun tidak langsung dapat mempengaruhi *total output* (Pertumbuhan Ekonomi) yakni melalui penyediaan infrastruktur, barang–barang publik dan insentif pemerintah terhadap dunia usaha seperti subsidi ekspor.

Menurut **Suparmoko (1996)**, pengeluaran–pengeluaran pemerintah untuk jaminan sosial, pembayaran bunga dan bantuan pemerintah lainnya akan menambah pendapatan dan daya beli. Secara keseluruhan pengeluaran pemerintah ini akan memperluas pasaran hasil–hasil perusahaan dari industri yang pada gilirannya akan memperbesar pendapatan. Dengan bertambahnya pendapatan yang diperoleh pemerintah, maka akan mendorong pertumbuhan ekonomi.

Selanjutnya **Suparmoko (1996)** mengatakan pengaruh yang terjadi dengan adanya pengeluaran dan penerimaan pemerintah, ini tegantung pada hubungan perimbangan antara pengeluaran dengan pendapatan pemerintah itu sendiri. Jika anggaran surplus, artinya pendapatan dari pajak–pajak dengan pungutan–pungutan lain lebih besar dari pengeluarannya, maka pengaruh yang ditimbulkan terhadap kehidupan ekonomi bersifat kontraktif atas *employment*, produksi regional dan output. Sebaliknya bila anggaran itu ternyata defisit yakni pengeluaran atau pembelanjaan pemerintah melampaui pendapatannya timbulah efek ekspansif dalam perekonomian.

Berdasrkan teori diatas, maka baik atau tidaknya hasil yang dapat dicapai oleh kebijakan pemerintah tergantung dari kualitas pemerintah itu sendiri. Apabila pemerintah tidak atau kurang efisien, maka akan terjadi pemborosan dalam penggunaan faktor-faktor produksi. Jika pemerintah terlalu berkuasa dan menjalankan fungsi-fungsi ekonomi di dalam perekonomian suatu negara maka peranan swasta akan menjadi semakin kecil, para individu dan juga badan-badan usaha tidak lagi dapat melatih dirinya dalam menciptakan berbagai inisiatif secara efektif untuk mencapai keputusan yang rasional yang sangat berguna bagi pencapaian kepuasan atau keuntungan yang maksimal. Sebaliknya pemerintah terlalu sedikit tanggung jawabnya terhadap masyarakat, kegiatan swasta akan dapat merusak kehidupan masyarakat yaitu dapat menimbulkan adanya pembagian penghasilan yang tidak merata, timbulnya kegiatan-kegiatan monopoli, tidak ada usaha-usaha yang sangat penting untuk kepentingan umum yang diusahakan.

**2.2 Penelitian Terdahulu**

Untuk memperkuat hipotesis dari penelitian yang akan dilakukan, selain teori - teori yang telah dipaparkan di muka, maka akan dipaparkan pula beberapa penelitian sebelumnya yang diharapkan juga dapat menjadi penentuan arah yang akan ditempuh dari penelitian ini, diantaranya :

1. Penelitian yang dilakukan oleh **Rindang Bangun Prasetyo**, dkk tahun 2009 yang berjudul Pengaruh Infrastruktur Pada Pertumbuhan Ekonomi Di Wilayah Indonesia. Penelitian tersebut menggunakan variabel dependen PDRB dan variabel independen nya jalan, listrik, dan air bersih. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kegiatan perekonomian di Indonesia masih bersifat padat karya dan infrastruktur listrik, jalan maupun air bersih berpengaruh positif terhadap perekonomian di Indonesia.
2. Penelitian berjudul Pengaruh Kondisi Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi di Jawa Barat yang ditulis oleh **Abdul Maqin** tahun 2011. Variabel yang digunakan adalah pertumbuhan ekonomi, infrastruktur jalan, kesehatan, pendidikan dan listrik, jumlah penduduk, dan besarnya pengeluaran pemerintah. Rasio panjang jalan dengan volume kendaraan, rasio infrastruktur kesehatan dengan jumlah penduduk, rasio infrastruktur pendidikan dengan jumlah murid di tahun 2000 dan 2007 mengalami peningkatan. 9 kabupaten yang memiliki pertumbuhan diatas rata-rata Jawa Barat sedangkan sisanya, yaitu 13 kabupaten dan kota memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi dibawah tingkat pertumbuhan ekonomi Jawa Barat. Faktor–faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi kabupaten dan kota di Jawa Barat dapat disimpulkan bahwa infrastruktur listrik, tenaga kerja, dan pengeluaran pembangunan mempunyai pengaruh positif dan signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi. Untuk infrastruktur jalan dan infrastruktur pendidikan memiliki hubungan yang positif namun tidak signifikan. Sedangkan infrastruktur kesehatan memiliki hubungan yang negatif dan tidak signifikan.
3. Penelitian berjudul Analisis Peran Infrastruktur Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Jawa Barat yang ditulis oleh **Evanti Andriani Syahputri** tahun 2013. Tujuan penelitian ini adalah menjelaskan perkembangan infrastruktur yang ada di Jawa Barat dan menganalisis peran infrastruktur terhadap pertumbuhan ekonomi di Provinsi Jawa Barat.. Variabel yang digunakan dalam penelitian ini adalah Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) sebagai pengukuran output, panjang jalan (km), jumlah energi listrik terjual (KWh), dan jumlah air bersih yang tersalurkan (m3). Hasil menunjukkan bahwa infrastruktur di Jawa Barat terus meningkat. Berdasarkan model dalam analisis, infrastruktur jalan, listrik dan air bersih memiliki efek yang positif dan kontribusi yang signifikan pada pertumbuhan ekonomi daerah dimana infrastruktur listrik memberikan kontribusi terbesar terhadap perekonomian daerah di Provinsi Jawa Barat. Penelitian ini memiliki perbedaan dan persamaan dengan beberapa penelitian terdahulu. Perbedaannya adalah wilayah objek penelitian, tahun periode penelitian, variabel penelitian, dan metode analisis yang digunakan juga ada yang berbeda. Keempat penelitian diatas rata-rata hanya mengukur pengaruh infrastruktur terhadap PDRB, namun dalam penelitian ini juga mengukur infrastruktur mana yang pengaruhnya paling besar terhadap PDRB dengan nilai elastisitas yang dihasilkan.

**2.3 Kerangka Pemikiran**

Keterkaitan infrastruktur dengan pertumbuhan ekonomi ditunjukkan dengan peningkatan output. Kurangnya ketersediaan infrastruktur di suatu daerah menyebabkan potensi sumber daya yang ada di daerah tersebut sulit untuk berkembang. Jika infrastruktur daerah dapat berkembang dengan baik maka akan merangsang pertumbuhan sektor-sektor yang ada di daerah tersebut yang pada akhirnya akan meningkatkan pendapatan masyarakat. Peningkatan ini diakibatkan karena mudahnya mobilitas faktor produksi yang terjadi antar daerah.

Berawal dari fungsi produksi **Cobb-Douglas** yang menyatakan bahwa produktivitas output terdiri dari tenaga kerja, modal dan teknologi. Setiap peningkatan pada jumlah tenaga kerja, modal dan teknologi akan memengaruhi perubahan pada tingkat output yang dihasilkan. Dalam penelitian ini modal yang digunakan yaitu dari sektor infrastruktur yang difokuskan pada infrastruktur jalan, listrik dan air bersih. Kemudian peningkatan infrastruktur ini akan memberikan pengaruh kepada pertumbuhan ekonomi yang dilihat dari Laju Pertumbuhan Ekonomi (LPE) Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Selain itu pengeluaran pembangunan juga dapat mempengaruhi kegiatan ekonomi Jawa Barat pada umumnya karena adanya peningkatan pengeluaran pembangunan ini dapat menciptakan sarana dan prasarana dalam infrastruktur jalan, listrik maupun air bersih yang secara tidak langsung akan direspon dengan meningkatnya jumlah investasi dan ketersediaan lapangan pekerjaan yang akan mempengaruhi meningkatnya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Variabel-variabel bebas yang diambil dalam penelitian ini adalah infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan pengaluaran pembangunan, sedangkan variabel terikatnya dalah variabel LPE Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Barat.

Hubungan LPE (terikat) dengan variabel-variabel bebasnya yaitu infrastruktur jalan, infrastruktur listrik, infrastruktur air bersih dan pengaluaran pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Panjang jalan yang ada di Jawa Barat mempunyai diduga pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena akan mempermudah dalam pendistribusian faktor produksi, baik barang maupun jasa. Panjang jalan juga membuka akses suatu wilayah ke wilayah lain sehingga pertumbuhan ekonomi akan meningkat dan mengurangi daerah yang tertinggal. Dengan bertambahnya panjang jalan dapat meningkatkan efisiensi dalam mobilitas kegiatan ekonomi. Sedangkan panjang jalan yang tidak bertambah akan menghambat mobiltas dan akan menambah biaya sosial dalam kegiatan perekonomian. Sehingga diperlukan upaya untuk dapat menambah panjang jalan yang sudah ada.
2. Listrik diduga berpengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena semakin banyak masyarakat yang berlangganan listrik menggambarkan banyaknya energi listrik yang di konsumsi oleh masyarakat, yang berarti ketersediaan akses daerah terhadap energi listrik dapat membantu meningkatkan pergerakan ekonomi daerah. Energi listrik yang dikonsumsi masyarakat menunjukkan seberapa besar akses suatu daerah terhadap energi kelistrikan yang dapat membantu dalam menggerakkan perekonomian daerah untuk peningkatan produktivitas ekonomi. Penggunaan listrik merupakan suatu hal yang sangat penting dalam peningkatan pertumbuhan ekonomi, karena dibutuhkan sebagai faktor utama dalam menunjang kegiatan proses produksi di sektor manufaktur **(Maqin, 2011)**.
3. Air bersih yang tersalurkan diduga mempunyai pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi karena ketersediaan akses terhadap air bersih akan meningkatkan pemenuhan kebutuhan akan air bersih untuk keperluan masyarakat di daerah tersebut. Jumlah air bersih yang tersalurkan menunjukkan seberapa besar air bersih yang dikonsumsi oleh masyarakat. Semakin banyak jumlah air bersih yang digunakan menggambarkan seberapa besar akses suatu daerah terhadap ketersediaan air bersih. Hal ini dikarenakan air bersih sebagai akses pendorong dalam produksi maupun konsumsi juga membantu meningkatkan produktivitas ekonomi **(Syahputri, 2013)**.
4. Pengeluaran pembangunan diduga berpengaruh negatif terhadap pertumbuhan ekonomi. Pengeluaran pembangunan merupakan pengeluaran negara yang digunakan untuk membiayai proyek pembanguna fisik dan non fisik. Pengeluaran ini mencerminkan peranan pemerintah dalam perekonomian yang lebih mengarah kepada investasi seperti pengeluaran untuk membangun jalan, listrik, air bersih, dan lain-lain. Pengeluaran pemerintah daerah terutama untuk infrastruktur akan menjadi simulator yang memberikan dampak lebih baik dalam peningkatan perekonomian **(Maqin, 2011)**.

 **Gambar 2.5 Kerangka Pemikiran**

|  |
| --- |
| **Infrastruktur Jalan** |

|  |
| --- |
| **Infrastruktur Listrik** |

|  |
| --- |
| **Pertumbuhan Ekonomi** |

|  |
| --- |
| **Infrastruktur Air Bersih** |

|  |
| --- |
| **Pengeluaran Pembangunan** |

**2.4 Hipotesis Penelitian**

Setelah adanya kerangka pemikiran diatas, maka hipotesis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Diduga panjang jalan memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi jawa Barat.
2. Diduga listrik memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi jawa Barat.
3. Diduga air bersih memiliki pengaruh yang positif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi jawa Barat.
4. Diduga pengeluaran pembangunan memiliki pengaruh yang negatif terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten/Kota Provinsi jawa Barat.